

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DAN PROFIL LPP RRI

2.1. Gambaran Umum Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan Efisiensi Anggaran merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang lebih efektif. Kebijakan Efisiensi Anggaran ini diberlakukan sejak tanggal 22 Januari 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini semakin krusial mengingat adanya keterbatasan fiskal, kebutuhan akan efisiensi dalam sektor publik, serta situasi ekonomi yang tidak stabil (Grehenson, 2025b). Dengan efisiensi anggaran, pemerintah dapat mengelola alokasi dana secara lebih bijak, meminimalkan pemborosan, dan memfokuskan pengeluaran pada sektor-sektor prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat (Supriyanto, 2024).

2.1.1. Tujuan Utama Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan ini memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya pemborosan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang maksimal berdasarkan laman djkn.kemenkeu.go.id. Dengan kata lain, kebijakan ini diciptakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna

menciptakan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; dengan pengelolaan anggaran yang efisien, proses pembangunan bisa berlangsung lebih efektif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan stabilitas ekonomi tetap terpelihara.

Berikut di bawah ini, dijelaskan beberapa tujuan yang diharapkan dari terciptanya Kebijakan Efisiensi Anggaran:

- **Mengendalikan Pengeluaran Negara**

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan pengeluaran tetap sejalan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Tanpa pengendalian yang efektif, belanja negara berpotensi melampaui batas dan menyebabkan defisit anggaran yang signifikan serta ketergantungan pada utang. Melalui efisiensi, pemerintah dapat mempertahankan stabilitas fiskal dan mencegah potensi krisis keuangan.

- **Meningkatkan Kualitas Belanja**

Fokus utama dari Kebijakan Efisiensi Anggaran bukan sekadar besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan bagaimana pengeluaran tersebut mampu menghasilkan hasil dan manfaat yang optimal. Prinsip ini dikenal sebagai *value for money*. Setiap pengeluaran harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi.

- **Mengurangi Pemborosan dan Duplikasi**

Tidak sedikit lembaga atau instansi yang melaksanakan program sejenis, yang pada akhirnya menimbulkan duplikasi kegiatan, ketidakefisienan, dan pemborosan anggaran. Melalui Kebijakan Efisiensi Anggaran, dilakukan pemetaan program serta analisis terhadap manfaatnya, sehingga kegiatan yang kurang produktif, tidak sesuai kebutuhan, atau saling tumpang tindih dapat dihentikan atau disatukan.

- **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Efisiensi mencakup seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasannya. Melalui sistem yang transparan, masyarakat dapat berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran. Akuntabilitas pun diperkuat dengan penerapan pelaporan yang berfokus pada kinerja dan hasil, bukan sekadar aspek administratif.

2.1.2. Strategi Umum Kebijakan Efisiensi Anggaran

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran tahun 2025 secara umum ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana publik sambil tetap menjaga mutu layanan publik berdasarkan laman djpb.kemenkeu.go.id.

Adapun beberapa langkah utama yang diambil meliputi:

- **Penghematan Belanja**

- Pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas hingga setengah dari total sebelumnya.
- Melakukan pembatasan terhadap kegiatan seremonial dan diskusi kelompok terfokus (FGD).
- Menetapkan pembatasan atas pemberian honorarium bagi tim yang terlibat dalam proyek-proyek tertentu.
- Mengalokasikan anggaran belanja secara terarah untuk mendukung pencapaian kinerja layanan publik.
- Menyalurkan hibah secara terpilih dan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan.

- **Penyesuaian Uang Persediaan**

- Melakukan pemotongan atau penghapusan Uang Persediaan, kemudian mengajukan permintaan ulang ke KPPN.

- **Prioritas Belanja**

- Mengarahkan bantuan sosial agar lebih tepat dan sesuai dengan sasaran yang dituju.
- Mengutamakan pengeluaran yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti di sektor infrastruktur dan pendidikan.

2.1.3. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran

- **Dampak Positif**

Kebijakan Efisiensi Anggaran memberikan berbagai manfaat penting bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan laman djkn.kemenkeu.go.id. Beberapa dampak positif dari penerapan Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap proses pembangunan antara lain:

- **Peningkatan Mutu Infrastruktur.** Melalui pengelolaan anggaran yang efisien, pemerintah mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik tanpa menghamburkan dana pada hal-hal yang tidak atau kurang diperlukan.
- **Menjamin Kelangsungan Proyek Pembangunan.** Pengelolaan anggaran yang efisien memungkinkan pemerintah mengatur alokasi dana secara cermat, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terus berlangsung tanpa hambatan finansial.
- **Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.** Pengelolaan anggaran yang optimal memberikan dampak nyata bagi masyarakat, melalui penyaluran subsidi kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang lebih efisien. Selain itu, efisiensi belanja pemerintah turut berperan dalam mengendalikan inflasi yang bisa timbul akibat kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran.

- **Meningkatkan Inovasi dalam Proses Pembangunan.**

Pengelolaan anggaran yang efisien membuka peluang bagi pemerintah untuk menerapkan teknologi dan solusi inovatif dalam pelaksanaan pembangunan.

- **Menekan Praktik Korupsi dan Kebocoran Anggaran.**

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran turut mendukung pemberantasan korupsi dengan memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi penggunaan dana. Dengan demikian, risiko kebocoran dapat ditekan, sehingga anggaran pembangunan benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, pengelolaan yang efisien memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan meminimalkan pemborosan, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat secara maksimal.

- **Menjamin Stabilitas Ekonomi.** Pemanfaatan anggaran yang efisien memungkinkan pemerintah menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengurangi ketergantungan pada utang. Kondisi ini berkontribusi pada kestabilan ekonomi nasional, karena defisit yang terkendali dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, efisiensi dalam pengeluaran negara juga berperan dalam

menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah lonjakan inflasi yang berlebihan.

- **Dampak Negatif**

Selain dapat memberikan dampak yang positif, dikutip dari laman ums.ac.id, Kebijakan Efisiensi Anggaran juga dapat memberikan dampak yang bertentangan dalam berbagai hal, di antaranya:

- **Pemangkasan Anggaran di Sektor Layanan Publik.**

Pemangkasan anggaran di sektor layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Lembaga Publik.**

Adanya pemberhentian para pekerja honorer secara sepihak pada lembaga publik yang dibiayai oleh dana APBN atau APBD.

- **Turunnya Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terhambat.**

Sejumlah sektor jasa, termasuk perhotelan, mengalami dampak akibat pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas dan proyek-proyek pemerintah. Kondisi seperti ini dapat berisiko melemahkan daya beli masyarakat serta menghambat laju pertumbuhan

ekonomi di wilayah yang sangat mengandalkan pendanaan dari APBN dan APBD.

- **Pemangkasan Anggaran yang Timpang Antar Sektor Pemerintahan.** Pemangkasan anggaran tidak diterapkan secara menyeluruh. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertahanan, kepolisian, dan intelijen tetap relatif utuh tanpa adanya pemangkasan yang signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait prioritas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

2.1.4. Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Tantangan terbesar dalam menerapkan Kebijakan Efisiensi Anggaran adalah menjamin efisiensi yang efektif tanpa menurunkan mutu layanan publik, memastikan kelangsungan program-program prioritas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Di samping itu, keterbatasan sumber daya, potensi dampak terhadap layanan publik, serta pentingnya mempertahankan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi isu krusial yang harus dihadapi.

Berikut ini merupakan sejumlah tantangan yang lebih rinci dalam penerapan Kebijakan Efisiensi Anggaran:

- **Ketidakefisienan pada Jumlah Kabinet.** Banyaknya jumlah kabinet yang ditetapkan tidak sejalan (kontradiktif) dengan

adanya Kebijakan Efisiensi Anggaran yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan (Grehenson, 2025a).

- **Budaya Birokrasi yang Boros.** Budaya birokrasi yang cenderung boros dalam membelanjakan anggaran untuk keperluan rutin, seperti alat tulis kantor dan rapat teknis, menjadi tantangan dalam implementasi efisiensi anggaran. Perubahan budaya ini memerlukan waktu dan pendekatan yang tepat (Grehenson, 2025a).
- **Adaptasi dan Resiliensi.** Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran serta mengupayakan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal (*Website DJKN*, n.d.).
- **Pengelolaan Keuangan Daerah.** Sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, menurut laman dprd.sumenepkab.go.id, diperlukan peningkatan kompetensi SDM di bidang keuangan serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- **Menghadapi Tantangan Ekonomi.** Penerapan efisiensi anggaran harus dilakukan secara cermat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Pemotongan anggaran yang

tidak terarah berisiko menimbulkan kontraksi ekonomi dan menghambat laju pertumbuhan (Zamzami, 2025).

2.2. Profil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)



Gambar 7 Logo LPP RRI
Sumber: ppid.rri.co.id

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) merupakan lembaga penyiaran berbadan hukum yang dibentuk oleh negara berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 14 ayat (1). Lembaga ini bersifat independen, netral, non-komersial, dan memiliki misi utama untuk memberikan layanan penyiaran bagi kepentingan publik, dengan kantor pusat yang berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Selain menyelenggarakan siaran nasional, RRI juga menayangkan program-program lokal di berbagai wilayah, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan RRI untuk menjangkau audiens hingga ke wilayah-wilayah terpencil, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) (*PPID LPP RRI*, n.d.).

Sebagai salah satu lembaga yang dimiliki secara penuh oleh negara, LPP RRI memperoleh pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk operasional tingkat nasional, serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kegiatan di tingkat regional atau daerah (*UU No. 32, 2002*). RRI bertugas menyelenggarakan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang berkualitas, serta berperan sebagai pengawas sosial, pemersatu masyarakat, dan pelestari budaya nasional. Tugas ini dilaksanakan melalui siaran radio yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta siaran internasional guna memperkuat citra positif bangsa di kancah global (*PPID LPP RRI, n.d.*).

2.2.1. Sejarah LPP RRI

Menurut laman RRI.co.id, RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 yang hingga saat ini, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. RRI didirikan setelah diadakannya rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Hasil dari rapat tersebut yakni dengan terpilihnya Dr. Abdulrahman Saleh sebagai Pemimpin Utama pertama RRI. Hari jadi RRI ini bertepatan hampir sebulan setelah diberhentikannya Hosokanri Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 akibat dari kekalahan Jepang atas Sekutu. Hosokanri Kyoku atau Pusat Jawatan Radio merupakan gabungan dari kumpulan jawatan radio swasta pada era penjajahan Belanda yang dibekukan ketika era penjajahan Jepang mulai memasuki Indonesia. Hosokanri

Kyoku sendiri berfungsi sebagai media untuk menyebarluaskan propaganda Jepang kepada masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laman ppid.rri.go.id, sebelumnya RRI merupakan sebuah perusahaan jawatan yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000. Namun seiring berjalannya waktu, RRI berkembang menjadi Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab menyelenggarakan siaran yang independen, netral, dan tidak berpihak, dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyuarakan kepentingan publik. Saat ini, LPP RRI tetap berperan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan pemersatu bangsa, dengan jaringan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

2.2.2. Visi dan Misi LPP RRI

Visi dan misi LPP RRI yang dimuat dalam laman mbc.ri.go.id yaitu:

- **Visi**

Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

- **Misi**

- Memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi melalui siaran dengan konten yang berkualitas serta mempunyai nilai pendidikan untuk memenuhi hak warga negara mendapatkan informasi yang independen, netral, dan akurat.
- Menyelenggarakan pelayanan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good public governance*.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana LPP RRI yang berbasis *multiplatform* untuk memudahkan akses bagi masyarakat mendapatkan layanan siaran RRI di wilayah NKRI dan mancanegara.

2.2.3. Layanan dan *Platform* LPP RRI

Mengutip dari laman RRI.co.id, LPP RRI saat ini menyediakan berbagai layanan dalam berbagai *platform* dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini juga tentunya menyesuaikan dengan seiring berkembangnya zaman dengan terus beradaptasi pada perubahan teknologi yang terjadi. Perkembangan teknologi inilah yang membuat RRI yang pada akhirnya memulai transformasinya melalui digitalisasi berbasis *multiplatform*. Meskipun begitu, RRI masih tetap mengandalkan layanan siarannya dalam

bentuk yang konvensional, yaitu radio analog, seperti FM, AM, dan SW. Menurut RRI, teknologi ini masih sangat efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.

Berikut di bawah ini, berbagai layanan yang disediakan oleh RRI dalam berbagai *platform*:

- **Siaran Radio**

RRI saat ini (per tanggal 11 September 2024) diketahui mempunyai sebanyak 105 stasiun penyiaran radio yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan 37 di antaranya berada di wilayah perbatasan. Hal ini memungkinkan LPP RRI dalam menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LPP RRI sendiri saat ini memiliki 5 saluran yang dibedakan berdasarkan jenis informasi yang disampaikan sehingga sebagian besar program acara di setiap salurannya berbeda. Bahkan di setiap daerah/kota yang berbeda juga memiliki program acaranya sendiri.

Berikut di bawah ini, uraian secara singkat mengenai 4 saluran radio yang dimiliki LPP RRI hingga saat ini:

1. Program 1



Gambar 8 Logo RRI Pro 1
Sumber: ppid.rri.go.id

Programa 1 atau yang biasa disebut sebagai Pro 1 merupakan salah satu saluran radio dari LPP RRI yang mencakup 84 stasiun penyiaran lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pro 1 memiliki frekuensi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, sehingga program acara yang disiarkan juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pro 1 memiliki slogan yang berbunyi “*Kanal Informasi dan Inspirasi*”. Sesuai dengan slogannya, Pro 1 memiliki fokus program acara yang memuat konten informasi, kebudayaan, hiburan, serta keagamaan, dengan sasaran utama pendengar usia dewasa dan lansia.

2. Programa 2



Gambar 9 Logo RRI Pro 2
Sumber: ppid.rri.go.id

Programa 2 atau yang biasa disebut sebagai Pro 2 merupakan salah satu saluran radio dari LPP RRI yang mencakup 63 stasiun penyiaran lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pro 2 memiliki frekuensi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, sehingga program acara yang disiarkan juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pro 2 memiliki slogan yang berbunyi "*Teman Terbaik Kamu*". Sesuai dengan slogannya, Pro 2 memiliki fokus program acara yang memuat informasi aktual, hiburan untuk kalangan muda, serta konten yang mendorong gaya hidup yang lebih sehat dan berkualitas, dengan sasaran utama pendengar di rentang usia 12 hingga 25 tahun.

3. Programa 3



Gambar 10 Logo RRI Pro 3
Sumber: ppid.rri.go.id

Programa 3 atau yang biasa disebut sebagai Pro 3 merupakan salah satu saluran radio dari LPP RRI yang menempati posisi sebagai jaringan radio publik terbesar kedua di tingkat nasional.. Pro 3 memiliki slogan yang berbunyi “*Jaringan Berita Nasional*”. Sesuai dengan slogannya, Pro 3 memiliki fokus program acara yang dikhususkan sepenuhnya untuk siaran berita. Meskipun berita menjadi fokus utama siarannya, sesekali program ini juga menyajikan musik.

4. Programa 4



Gambar 11 Logo RRI Pro 4
Sumber: ppid.rri.go.id

Programa 4 atau yang biasa disebut sebagai Pro 4 merupakan salah satu saluran radio dari LPP RRI yang mencakup 33 stasiun penyiaran lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pro 4 memiliki frekuensi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, sehingga program acara yang disiarkan juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pro 4 memiliki slogan yang berbunyi “*Suara Budaya Nusantara*”. Sesuai dengan slogannya, Pro 4 memiliki fokus program acara yang memuat lagu-lagu daerah unggulan yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

5. Programa 5



Gambar 12 Logo RRI Pro 5
Sumber: google.com

Programa 5 atau yang biasa disebut sebagai Pro 5 merupakan salah satu saluran radio dari LPP RRI yang saat ini hanya mencakup beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Surabaya dan Makassar. Pro 4 memiliki slogan yang berbunyi “*Musik Terbaik*”.

Sesuai dengan slogannya, Pro 5 menyajikan lagu-lagu dalam negeri dan internasional, mulai dari hits era 80-an hingga musik masa kini. Disajikan dalam format *full* musik, tayangan ini mengudara nonstop selama 24 jam tanpa jeda.

- ***Voice of Indonesia (VOI)***



Gambar 13 Logo RRI VOI

Sumber: google.com

Voice of Indonesia (VOI) adalah saluran radio internasional dari LPP RRI, jaringan radio publik Indonesia. Kami melayani pendengar internasional melalui siaran radio dalam 9 bahasa (Inggris, Indonesia, Prancis, Jerman, Spanyol, Arab, Jepang, Tionghoa [Mandarin], dan yang terbaru Belanda), serta radio visual berbahasa Inggris (RRI NET). VOI sendiri memiliki slogan yang berbunyi “*From Indonesia to The World*”.

- **RRI Net**



Gambar 14 Logo RRI Net
Sumber: google.com

RRI Net merupakan salah satu bentuk inovasi dari LPP RRI dalam menyikapi hadirnya era digitalisasi yang berupa kanal YouTube. Inovasi RRI Net yang diluncurkan bertepatan dengan Peringatan Hari Radio Nasional dan HUT ke-73 RRI, menghadirkan kemudahan bagi pendengar melalui fitur yang memungkinkan mereka menyaksikan siaran radio secara daring dengan tampilan visual yang lebih interaktif dan menarik. Slogan dari RRI Net sendiri berbunyi “*Tonton Apa yang Anda Dengar*”.

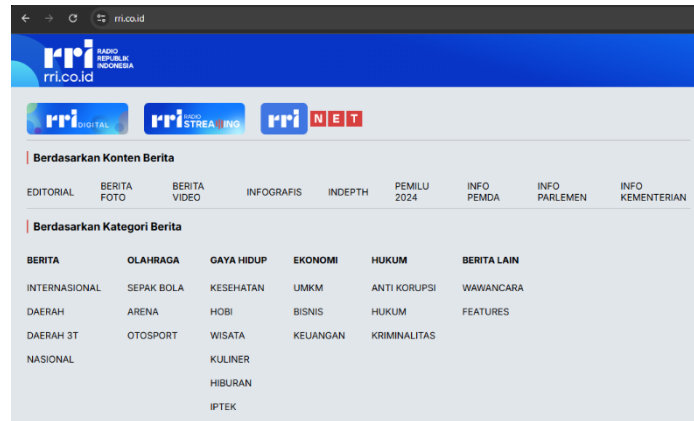
- **Portal Berita RRI.co.id**



Gambar 15 Logo RRI.co.id
Sumber: RRI.co.id

RRI.co.id merupakan portal berita yang menyediakan berbagai layanan dari LPP RRI. Melalui situs *website* RRI.co.id, pengguna bisa menikmati layanan berbagai berita *online*,

streaming siaran radio secara langsung, serta berbagai konten multimedia lainnya yang diproduksi oleh LPP RRI.



Gambar 16 Tampilan Pilihan Rubrik RRI.co.id
Sumber: RRI.co.id

RRI.co.id menyajikan beberapa rubrik atau kategori pilihan berita yang bisa dipilih oleh para pengguna sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya itu, RRI.co.id juga sudah bisa terhubung dengan berbagai layanan dari LPP RRI lainnya. seperti RRI Net, RRI Radio Streaming, RRI Digital, dan RRI News secara langsung.

- **RRI Digital**



Gambar 17 Logo RRI Digital
Sumber: google.com

RRI Digital merupakan salah satu aplikasi seluler dari LPP RRI yang memungkinkan pengguna untuk menikmati *streaming* radio, menyaksikan radio visual, mengakses *podcast*, video, mendengarkan *playlist* lagu, serta berkomunikasi dengan penyiar dan komunitas. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai layanan RRI secara digital, termasuk siaran radio dan konten multimedia, yang tersedia kapanpun dan di manapun. Aplikasi RRI Digital adalah hasil *rebranding* dari aplikasi sebelumnya yang dikenal dengan nama 'RRI Play Go'. Saat ini, RRI Digital dapat diunduh baik melalui Google Play Store maupun Apple App Store.

- **RRI News**



Gambar 18 Logo RRI News
Sumber: google.com

RRI News merupakan salah satu aplikasi seluler dari LPP RRI untuk mengakses berita digital rri.co.id dalam format teks, audio, dan video. Aplikasi ini menyajikan berbagai informasi terkini yang kredibel dan bersifat edukatif bagi masyarakat. Saat ini, RRI News dapat diunduh baik melalui Google Play Store maupun Apple App Store.